

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2024 PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum tahun 2024 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2024 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memberikan penilaian secara mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Asesor, Tim Kerja, dan Tim Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan bimbingan dan arahan kepada Penanggung Jawab, Tim Asesor, Tim Kerja, dan Tim Sekretariat dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 2. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 3. Tim Asesor terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - 1) Memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan rencana;
 - 2) Memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Anggota Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 4. Ketua Tim Kerja terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Kerja bertugas:
 - 1) memastikan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan sasaran;

2) memonitor penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

b. Anggota Tim Kerja bertugas:

1) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan

2) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

5. Tim Sekretariat bertugas:

a. memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja

b. membantu mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum

KETIGA : Tim Penilai Mandiri melaksanakan tugas pada diktum KEDUA sesuai dengan kalender kerja sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala, Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2024 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 28 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Mei 2024

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2024 PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/ Jabatan
1.	Pengarah	: Sekretaris Utama
2.	Penanggung Jawab	: Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
3.	Tim Asesor	
	Ketua	: Rinaldi Morintosh
	Anggota	: 1. Rasmita Juliana Sitepu 2. Yogie Prastiyans
4.	Tim Kerja	
	Ketua	: Inamawati Mastuti Dewi
	Anggota	: 1. Asih Riska Nurmasari 2. Carolina Maria Anggreini

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/ Jabatan	
5.	Tim Sekretariat		
	Ketua	:	Apriliansyah Ariyoga
	Anggota	:	1. Muhamad Bayu Firmansyah 2. Salwa Nida

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2024 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 28 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 Mei 2024

KALENDER KERJA
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2024
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum	April - Agustus 2024

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN